

## Bagian I

### *Pendahuluan*

#### A. Latar Belakang

Wayang purwa atau *ringgit purwa* merupakan mahakarya seni rupa yang dibuat dari kulit lembu, kulit kerbau atau kulit kambing yang ditatah dan diberi warna dengan cat. Wayang merupakan warisan budaya nenek moyang Indonesia, khususnya budaya Jawa, yang telah mampu bertahan berabad-abad dengan mengalami perubahan dan perkembangan.

Daya tahan seni wayang purwa yang menunjukkan eksistensinya hingga kini membuktikan bahwa wayang purwa memiliki fungsi dan peranan dalam kehidupan budaya masyarakat. Namun demikian sepanjang perjalanannya, wayang purwa telah mengalami perubahan, baik fungsi maupun perannya, jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Walaupun demikian sulit untuk diperkirakan kapan wayang purwa akan mengalami kepunahan, seperti yang telah terjadi pada seni tradisional yang lain, seperti ludruk, *wayang klitik*, *wayang jemblung*, dan beberapa jenis kesenian tradisional lainnya.

Ciri yang tidak berubah sejak dahulu adalah, wayang purwa memiliki sifat multidimensional. Hal ini terlihat dalam unsur-unsur seni seperti seni sastra (berupa *janturan*, *pocapan*, dan *ginem*), seni suara (berupa gending, karawitan, sindenan dan gerongan), dan seni drama (berupa *lakon*). Selain itu, sebuah pertunjukan

wayang mampu memberikan banyak pengetahuan kepada *audience* melalui lakon atau cerita yang disajikan. Nilai lebih wayang kulit terletak pada sisi filosofi yang terkandung dalam pakeliran wayang kulit, dan dari kandungan filosofi inilah wayang kulit menjadi pemenang utama penghargaan warisan budaya dunia. Produk budaya tersebut lebih unggul dibanding kebudayaan mancanegara.<sup>1</sup> Selain itu, pertunjukan wayang kulit purwa mampu merefleksikan berbagai cabang seni seperti seni lukis, seni kriya, seni suara, dan cabang-cabang seni lainnya. Sifat multidimensional ini menjadi penarik hati khalayak penontonnya. Tidak ada jenis pertunjukan rakyat yang dapat memikat penontonnya selama berjam-jam, bahkan semalam suntuk, kecuali pertunjukan wayang kulit purwa. Pertunjukan wayang kulit pun masih bertahan di akar rumput masyarakat Jawa, khususnya pada golongan petani dan nelayan yang masih sering menyelenggarakannya, biasanya untuk keperluan upacara adat yang bersifat magis. Mengakarnya kesenian wayang kulit di kalangan akar rumput menandakan bahwa seni tradisi masih menjadi *klengkapan* masyarakat kebanyakan, meski tidak dipungkiri para peminatnya rata-rata dari golongan orang-orang tua.

Asal mula pementasan wayang kulit di Nusantara belum diketahui secara pasti. Berita tertulis

---

<sup>1</sup>Tulus Warsito, Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 175.

tertua yang menyebutkan mengenai wayang terdapat dalam Kakawin Arjunawiwaha gubahan Mpu Kanwa yang hidup pada masa pemerintahan Raja Airlangga (1019-1042).<sup>2</sup>Kata wayang dalam kakawin tersebut nampak pada penyebutan “*awayang*” atau “*aringgit*” dalam Serat Centhini Jilid IX sebagai berikut.

*Hananonton ringgit manangis asekel muda bidepan buvus wrub tuwin yan walulang inukir malah inucap batur nin wan tresnen wisaya malaha ta nibikanari tatwa nyan maya sabana-hana nin bawa siluman.*

(Ada orang yang menonton wayang menangis sedih. Bodoh benar dia. Padahal sudah tahu juga bahwa yang bergerak dan berbicara itu kulit yang ditatah. Memang kata orang dia sedang terkena daya gaib, sedangkan seharusnya ia tahu bahwa pada hakekatnya (pertunjukan) itu hanyalah palsu, segala yang ada ini maya belaka).<sup>3</sup>

*Ringgit purwa* merupakan jenis wayang yang paling terkenal dan tekniknya telah berubah dari suatu kesenian rakyat menjadi suatu kesenian keraton. *Ringgit purwa* didasarkan atas sejumlah cerita yang diambil dari *Serat Rama (Ramayana)* dan *Bharatayudha (Mahabharata)*. Bentuk wayang purwa pipih berdimensi dan dibuat dari

---

<sup>2</sup>S. Haryanto, *Pratinimba Adhiluhung*(Jakarta: Djambatan, 1988), hlm. 34.

<sup>3</sup>*Ibid.*

kulit yang ditatah serta dilengkapi dengan tangan yang dapat digerakkan.<sup>4</sup>

Pertunjukan wayang kulit juga merupakan pertunjukan yang memiliki tingkat kompleksitas diversitas seni yang tinggi. Tidak hanya menampilkan sederetan wayang dengan membawakan lakon tertentu, melainkan sebuah pertunjukan yang mengharmonisasikan kesenian lain untuk dapat berkolaborasi dengan baik. Salah satu seni yang menjadi pendukung dari pertunjukan wayang kulit purwa adalah karawitan. “*Karawitan mahanani roh wayang saged gesang sakmangke wonten pagelaran*” (karawitan merupakan ruh dari pementasan wayang). Pagelaran wayang tidak akan bisa hidup tanpa iringan gamelan.<sup>5</sup> Karawitan diperlukan untuk menimbulkan suasana khidmat, *nges*, harmonis, serta luhur yang juga dipadukan dengan *kandha* (dialog) serta *suluk* (pengucapan dhalang mengenai situasi cerita).

Lakon pewayangan yang dibawakan dalang merupakan arti simbolis dan moral. Pertunjukan wayang kulit menjadi ajang pembelajaran moral dan gudang teladan yang dapat dicontoh dalam menghadapi persoalan- persoalan berat yang sangat berguna, khususnya bagi tataran masyarakat yang tidak berpendidikan sekalipun, misalnya mengenai

---

<sup>4</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 290.

<sup>5</sup>Wawancara dengan bapak Warseno, 23 Desember 2012.

perjuangan keadilan dalam merebut tanah kekuasaan antara Pandawa dan Kurawa yang tergambar lewat lakon Baratayudha. Demikian juga lakon yang mendeskripsikan ajaran moral seperti Pikukuhan, Sri Mahapunggung, Batari Sri Mantuk, yang menggambarkan kebajikan dewa terhadap manusia dengan pemberian palawija, serta lakon Murwakala untuk *ruwatan*.<sup>6</sup>

Pementasan wayang kulit di Jawa Tengah telah dilakukan pada banyak momen-momen penting, baik itu di keraton maupun di kalangan rakyat kebanyakan. Aktivitas kesenian memang menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas kerajaan. Pewarisan seni dilakukan secara turun-temurun. Ketika Mataram Islam pecah menjadi dua bagian, Surakarta dan Yogyakarta dan kemudian ditambah Pura Mangkunagaran, tradisi seni tetap menjadi bagian dari aktivitas kerajaan.<sup>7</sup> Hal ini terlihat dalam Palagan Sikepyak yang mengungkapkan pergelaran pertunjukan Bedhayan

---

<sup>6</sup>Sartono Kartodirdjo, *et al.*, “*Laporan Survey Pertunjukan Rakyat Tradisionil*” (Laporan Penelitian Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1975). Lakon ruwatan sendiri dapat dijadikan sebagai perwujudan kritik sosial pada masa Orde Baru. Baca “Ruwatan, Sebuah Karya Kritik Sosial”, *Kompas*, 3 September 1990)

<sup>7</sup>Zainuddin Fanamie, *Restrukturisasi Budaya Jawa : Perspektif KGPA MN 1* (Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), hlm. 230.

beserta iringan *gendhing* dan *sindhenan*-nya yang dilakukan oleh Mangkunegara I sebagai berikut.

*Pan angunggar manabe kang bala-bala,*

*senggak bala prajurit,*

*lir wong menang aprang,*

*wong kumpeni Juwana,*

*mempen tan purun medali,*

*enjang umangkat,*

*ngidul-ngetan lumaris. (Durma)<sup>8</sup>*

Pada tahun-tahun tersebut, antara tahun 1478 hingga 1745, pertunjukan wayang atau pedhalangan digarap oleh pimpinan negara, budayawan, dan para ahli. Abdi Dalem Wayang-lah yang memegang peran sentral sebagai dalang yang belum tinggi pendidikan umumnya.<sup>9</sup>

Pada masa Orde Lama di Indonesia yang terhitung sejak tahun 1945, yakni pada kepemimpinan Soekarno, seni pedalangan telah hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Pertunjukan wayang kulit mulai banyak digarap oleh para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Pada masa tersebut dibuka beberapa kursus pedalangan seperti kursus pedhalangan Himpunan Siswa Budaya pada tahun 1953 di

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Sri Mulyono, *Wayang Asal-Usul, Filsafat, dan Masa Depan*nya (Jakarta: Gunung Agung, 1978), hlm. 99.

Yogyakarta dengan guru R.M. Sri Handayakusuma, Susilaatmaja, dan Pringga Satata dengan 14 orang mahasiswa<sup>10</sup> dan Ngesti Budhaya di Semarang yang didirikan pada tahun 1958.<sup>11</sup>

Kepemimpinan Ir. Soekarno juga menghasilkan Kongres Pedalangan Indonesia yang berlangsung dari tanggal 23 hingga 28 Agustus 1958 di Perang Wedanan Kompleks Kraton Mangkunegaran, Surakarta.<sup>12</sup> Berbagai partai politik pada saat itu, terutama Partai Komunis Indonesia (PKI) tampak memperlihatkan perhatian yang semakin besar terhadap peranan potensial dalang di dalam menggerakkan rakyat untuk tujuan-tujuan kepartaian.<sup>13</sup> Pada masa yang sama, setelah Gerakan 30 September 1965 gagal dilakukan dan berlanjut dengan pembersihan oknum-oknum PKI, hal yang sama juga terjadi di kalangan dalang. Mereka yang tidak terbunuh atau lolos dari penangkapan kemudian dikenai larangan bermain selama jangka waktu tertentu. Seluruh dalang juga diwajibkan untuk mendaftarkan diri, melaporkan rencana pergelaran hingga menyerahkan sinopsis lakon yang hendak dipergelarkan.<sup>14</sup> Dominasi pemerintah begitu kentara

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Wawancara dengan Ki KRT Suparno Hadiatmodjo, 21 Desember 2013.

<sup>12</sup>Sri Mulyono, *ibid.*, hlm. 110.

<sup>13</sup>Victoria M. Clara van Groenendael, *Dalang di Balik Wayang* (Jakarta: PT Temprint, 1987), hlm. 219.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 220.

sejak peristiwa G 30 S tersebut. Hingga kemudian dimulainya Orde Baru pada tahun 1966, dominasi pemerintah terhadap seniman khususnya dalang menjadi semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan organisasi Himpunan Kebaktian Dalang, organisasi dalang pertama pada masa Orde Baru, yang didirikan atas hasil konferensi 80-an peserta pada 18 dan 19 Desember 1966 di Surakarta.<sup>15</sup>

## **B. Permasalahan**

Dalang sebagai penyampai lakon memegang peran sentral dalam pertunjukan wayang kulit. Selain menyampaikan lakon pada umumnya, dalang juga menyampaikan amanat atau pesan-pesan yang disisipkan pada setiap pertunjukan. Pesan-pesan tersebut dapat berupa pesan bernuansa sosial, politik, dan budaya. Selain itu dalang juga berperan sebagai media pendidikan informal yang mengajarkan nilai-nilai filosofis dari lakon dan tokoh-tokoh wayang.

Latar waktu pada masa Orde Baru merupakan perpaduan dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Pada masa Orde Baru, yang penulis kaji dari tahun 1986, banyak mengisyaratkan nuansa pembungkaman media massa baik cetak maupun elektronik. Pada kurun waktu 1980-an, sejumlah publikasi satu demi satu mengalami pembredelan izin oleh pemerintah, contohnya Jurnal Ekuin dicabut izin

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 223.



terbitnya pada bulan April 1983 karena memuat tulisan yang mengungkapkan soal penurunan harga dasar ekspor minyak oleh pemerintah; majalah Fokus yang kehilangan izin terbit pada bulan Mei 1984 setelah menerbitkan laporan daftar "200 Orang Kaya Indonesia".<sup>16</sup> Tak hanya itu, warga masyarakat atau golongan tertentu yang dianggap "berbahaya" bagi kelangsungan pemerintahan Soeharto akan dimusnahkan. Secara tidak langsung, situasi sosial politik Indonesia pada tahun-tahun tersebut kurang menampilkan wajah akomodatif. Hal ini masih ditambah lagi dengan kebijakan Orde Baru yang sering mengedepankan kebijakan bersifat *top-down* ketimbang *bottom-up*.<sup>17</sup>

Dalang yang bertugas sebagai pembawa pesan-pesan moral dalam setiap pertunjukan sudah tentu menerima perlakuan yang sama. Kreativitas dalang lebih diawasi dan dikontrol pemerintah.<sup>18</sup> Meskipun demikian, kebijakan pemerintah Orde Baru dalam hal pengembangan kebudayaan tergolong baik. Kebijakan tersebut terdapat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 4

---

<sup>16</sup>David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 41.

<sup>17</sup>Kebijakan bersifat *top-down* seringkali tidak tepat sasaran. Berbeda dengan kebijakan bersifat *bottom-up* yang meng-cover permasalahan masyarakat dari suara masyarakat itu sendiri.

<sup>18</sup>"Wayang Kritik: Kesenian Tradisionil yang Hampir Punah", *Sinar Harapan*, 28 September 1980.

Tahun 1989 tentang Dasawarsa Kebudayaan. Instruksi ini dikeluarkan agar seluruh elemen masyarakat Indonesia dapat membangkitkan rasa kebanggaan dan kecintaan terhadap kebudayaan, mendorong pengembangan kebudayaan, menunjang kegiatan pariwisata serta meningkatkan peranan Indonesia dalam membina kerja sama internasional. Pelaksanaan program dan rencana kegiatan Dasawarsa Kebudayaan di daerah dilaksanakan oleh Panitia Daerah yang dibentuk dan dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah.<sup>19</sup>

Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1989 tentang Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991 juga menandakan tingginya usaha pemerintah untuk mengembangkan sektor kepariwisataan Indonesia yang salah satunya dilakukan dengan pertunjukan kesenian. Instruksi ini dikeluarkan atas dasar Deklarasi Manila tahun 1987 untuk menyelenggarakan Tahun Kunjungan Wisata ASEAN pada tahun 1992. Instruksi ini juga dikeluarkan untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan pariwisata Indonesia melalui Kampanye Sadar Wisata secara Nasional. Kampanye Sadar Wisata dilakukan dengan menggali seluruh potensi nasional, dengan berkoordinasi bersama masyarakat luas.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 1989 tentang Dasawarsa Kebudayaan.

<sup>20</sup>Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1989 tentang Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991, disahkan tanggal 4 April 1989.